

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN PROSEDUR
PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA PADA KPPN SURABAYA II**

SKRIPSI

Oleh

FINA YULI NUR ROCHMAH

NIM: 08010222014



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2026

PERNYATAAN

Saya, Fina Yuli Nur Rochmah, 08010222014, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 19 Februari 2026



Fina Yuli Nur Rochmah
NIM. 08010222014

Surabaya, 19 Februari 2026

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Nufaisa.

Nufaisa, M.Ak

NIP. 198907312019032014

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KPPN SURABAYA II

oleh:

FINA YULI NUR ROCHMAH

NIM: 08010222014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 30 Maret 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Nufaisa M.Ak
NIP. 198907312019032014
(Penguji 1)
2. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A, CSRS
NIP: 199110012019032020
(Penguji 2)
3. Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc
198308082018012001
(Penguji 3)
4. Febry Fabian Susanto, S.Si., M.Ak
199602172024031001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:

.....
.....
.....
.....



Surabaya, 30 Maret 2026

Dr. Sunjul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fina Yuli Nur Rochmah
NIM : 08010222014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address : yfina14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KPPN SURABAYA II

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 April 2026

Penulis



(Fina Yuli Nur Rochmah)

ABSTRAK

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat menghambat penyerapan anggaran dan menimbulkan dana menganggur (*idle cash*). Meskipun jumlah keterjadian retur cenderung menurun, nominal saldo retur di KPPN Surabaya II masih menunjukkan fluktuasi sehingga memerlukan analisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab retur SP2D dan prosedur penyelesaiannya, serta menentukan faktor dominan penyebab retur SP2D di KPPN Surabaya II.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap data monitoring retur SP2D tahun 2021-2024 pada KPPN Surabaya II.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab retur SP2D meliputi adanya rekening tidak aktif, nomor atau nama rekening berubah, nomor atau nama rekening salah atau tidak sesuai, dan gangguan bank operasional. Faktor yang paling dominan berasal dari satuan kerja, khususnya pada kesalahan dalam penulisan nama dan nomor rekening. Prosedur penyelesaian retur SP2D di KPPN Surabaya II telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang menganut pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018, mulai dari penerbitan surat pemberitahuan retur, penyampaian surat ralat oleh satuan kerja, hingga penerbitan kembali SP2D retur.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPPN Surabaya II melakukan pemetaan terhadap jenis kesalahan yang paling sering terjadi berdasarkan data historis retur SP2D, serta meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara rutin kepada satuan kerja. Selain itu, bagi satuan kerja, diperlukan penguatan sistem validasi data rekening sebelum pengajuan SPM, peningkatan ketelitian dalam penyusunan data, serta pemanfaatan teknologi perbankan seperti *mobile banking* untuk verifikasi data, sehingga keterjadian retur SP2D dapat ditekan seminimal mungkin.

Kata kunci: Faktor Penyebab, KPPN Surabaya II, Prosedur Penyelesaian, Retur SP2D, Satuan Kerja

ABSTRACT

Return warrant disbursement of funds (SP2D) is a problem that occurs in the process of disbursement of funds from the state budget (APBN) which can inhibit the absorption of the budget and cause idle funds (idle cash). Although the number of returns tends to decrease, the nominal balance of returns in KPPN Surabaya II still shows fluctuations that require further analysis.

This study aims to analyze the factors that cause SP2D returns and settlement procedures, as well as determine the dominant factors that cause SP2D returns in KPPN Surabaya II. This study uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of SP2D return monitoring data for 2021-2024 at KPPN Surabaya II.

The results showed that the factors that cause SP2D returns include inactive accounts, account number or name changes, wrong or inappropriate account number or name, and disruption of bank operations. The most dominant factor comes from the work unit, especially on errors in writing the name and account number. The procedure for completing SP2D returns at KPPN Surabaya II has been carried out in accordance with Standard Operating Procedures that adhere to the Director General of Treasury Regulation Number PER-9/PB/2018, starting from the issuance of return notification letters, submission of error letters by work units, to the issuance of SP2D returns.

Based on the results of the study, it is recommended that KPPN Surabaya II conduct mapping of the most common types of errors based on historical data of SP2D returns, as well as improving socialization and regular coaching to work units. In addition, for work units, it is necessary to strengthen the account data validation system before filing SPM, increase accuracy in data preparation, and the use of banking technology such as mobile banking for data verification, So that the occurrence of SP2D returns can be reduced to a minimum..

Keywords: Causal Factors, KPPN Surabaya II, Settlement Procedure, SP2D Return, Work Unit

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	16
1.2.1 Identifikasi Masalah	16
1.2.2 Batasan Masalah	17
1.3 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan Penelitian	18
1.5 Manfaat Hasil Penelitian	19
1.5.1 Manfaat Teoritis	19
1.5.2 Manfaat Praktis	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Kajian Teori	20
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	20
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	21
2.1.3 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	23
2.1.4 Retur Surat Perintah Pencairan Dana	25
2.1.5 Prosedur	26
2.1.6 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Extension (SPANEXT)	27
2.1.7 Satuan Kerja (SATKER)	29
2.1.8 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	46

3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Tempat dan Lokasi Penelitian.....	47
3.3	Data dan Sumber Data	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5	Teknik Analisis Data.....	52
3.6	Teknik Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum KPPN Surabaya II	55
4.2	Hasil Penelitian	62
4.3	Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....		112
PENUTUP.....		112
5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		113
LAMPIRAN-LAMPIRAN		122



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

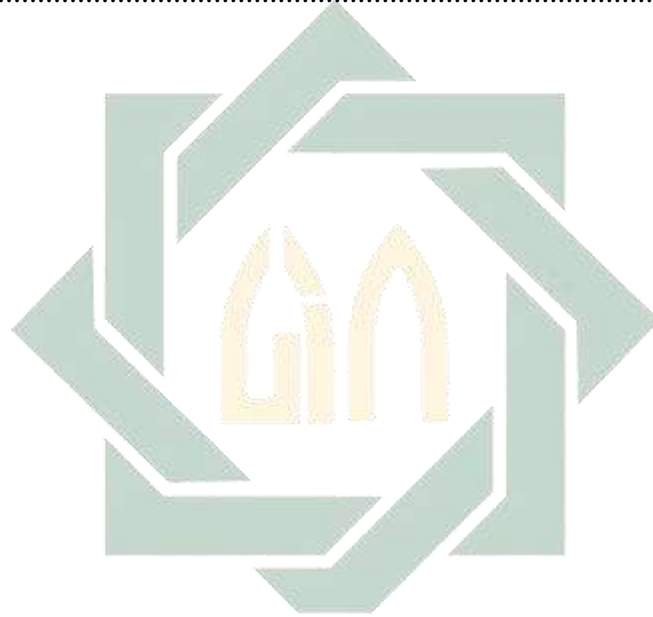
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Presentase Retur SP2D Tahun 2020-2024 di KPPN Tingkat Nasional.....	9
Gambar 1.2 Data Saldo Retur SP2D Tahun 2022-2024 di KPPN Tingkat Nasional	10
Gambar 1.3 Besarnya Nominal Retur SP2D KPPN Surabaya II Tahun 2021-2024	12
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Logo KPPN Surabaya II.....	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPPN Surabaya II.....	57
Gambar 4.3 Rekening Tidak Aktif.....	85
Gambar 4.4 Nomor atau Nama Rekening Berubah	87
Gambar 4.5 Nomor atau Nama Rekening Salah atau Tidak Aktif.....	88
Gambar 4.6 Gangguan Bank Operasional.....	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

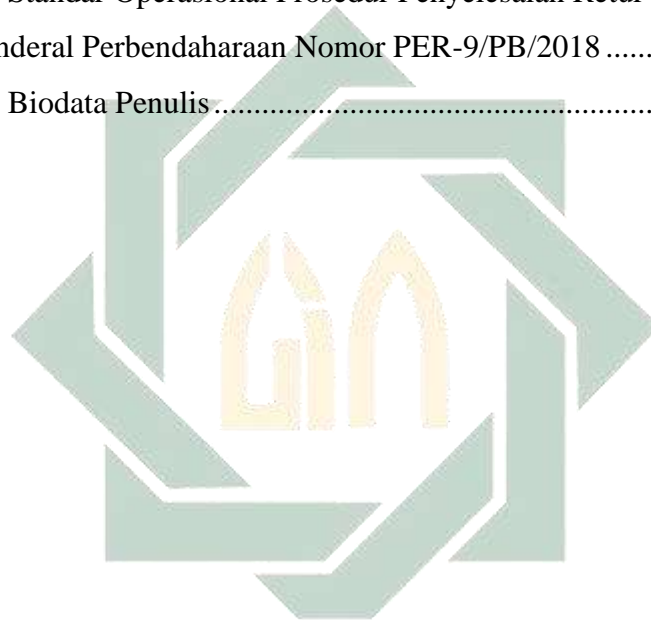
Tabel 1.1 Keterjadian Retur SP2D Tahun 2020-2024 di KPPN Tingkat Nasional .	8
Tabel 1.2 Keterjadian Retur SP2D Tahun 2021-2024 di KPPN Surabaya II	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Data Informan Wawancara	50
Tabel 4.1 Alasan dan Jumlah Retur SP2D Tahun 2021-2024	62
Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penyebab Retur SP2D di KPPN Surabaya II Tahun 2021-2024.....	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	122
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Informan	124
Lampiran 3 Analisis Data Wawancara.....	139
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian	156
Lampiran 5 Dokumentasi.....	157
Lampiran 6 Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Retur SP2D dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018	158
Lampiran 7 Biodata Penulis.....	159



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, H. M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Unja Publisher.
- Adistri, A. (2022). *Teks Prosedur*. Guepedia.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu administrasi negara: Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance: disusun berdasarkan kurikulum terbaru nasional perguruan tinggi agama Islam*. Pustaka Setia.
- Anggraini, M. (2024). Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), 627–638. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826>
- Arizki, W. (2021). *Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) Pada Bps Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
- Aswad, A., Masud, M., & Sjarlis, S. (2023). *System Analysis And Procedure For Issuing Fund Disbursement Orders (SP2D) On APBD Funds*.
- Bakari, R. I., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 5.
- Cahyanti, T., Puspita, I. L., Luthfi, M., & Mudrikah, R. E. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRMM)*, 13(1), 27–32. <https://doi.org/10.33024/jur.jeram.v13i1.16471>
- Cahyono, W. H., & Aisyah, R. H. S. (2020). Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah. *Jurist-Diction*, 3(2), 745–764. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18216>
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.

- Daga, R. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I)*. 4.
- Debora Sinlaeloe, F. (2021, December 17). *Retur SP2D, Antara Dilema dan Solusi*. DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3797-retur-sp2d,-antara-dilema-dan-solusi.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Buku Panduan Registrasi User SPAN EXT.pdf*. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/1ggMIIm_wjnoNasTTy50bt-N28ehIZXDV/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Internalisasi Fitur Validasi Rekening Pada Aplikasi Gaji Web dan Sakti*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Retrieved https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/langsa/images/Kep-57_PB_2023_Standar_Pelayanan_KPPN_DJPb.pdf
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2018/PER-9~PB~2018PerDJPB.pdf>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-13-pb-2024>

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 Tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara*. https://kppntanjungbalai.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/per-041-pb-2014_penggunaan-aplikasi-omspan.pdf
- Dwijayanto, A. (2025, May 5). Mengenal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/sp2d-surat-perintah-pencairan-dana/>
- Faiha, S. N. (2021). *Prosedur Penyelesaian Retur SP2D Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Mojokerto*. Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.
- Fitriana, N. A. S., & Muljanto, M. A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya 1. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3367–3378. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1660>
- Hafizah, G., Santosa, T. B., & Hasanah, M. (2025). Sistem Informasi Manajemen Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Berbasis Web di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Indonesian Journal of Information Technology and Computing*, 5. <https://journal.polhas.ac.id/index.php/imaging>
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Pratomo, Rahma Indera, & Eko Sabar Prihatin, Eds.). Poliban Press.
- Hariwidjaja, B., Miqdad, M., University of Jember, Farisi, I., & Indonesia Open University. (2023). Performance Analysis Using Balance Score Card (BSC) at the Banyuwangi State Treasury Service Office: A Phenomenology Study. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 2(12). <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2023.v2i12n06>
- Hunta, A. A., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2021). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Pemerintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Dinas Koperasi Kota Bitung*.
- Hutabarat, D. D., Winarno, W., & Diananto, R. (2021). *Pencairan Dana Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.

Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Irawati. (2025, March 7). Kurangnya Transparansi APBN Dinilai Berisiko Guncang Ekonomi Nasional. *Infobanknews*.
<https://infobanknews.com/kurangnya-transparansi-apbn-dinilai-berisiko-guncang-ekonomi-nasional/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan*. (2020, September 18). (PMK) No. 129/PMK.05/2020. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/146690/pmk-no-129pmk052020>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/210-pmk-05-2022>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/158355/pmk-no-2pmk022021>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/262-pmk-01-2016>

Koroh, Y. E., Sendouw, R. H., & Mamonto, F. H. (2022). Management of Financial Administration in the General Bureau of Regional Secretariat North Sulawesi Province in the Digital Era. *International Journal of Information Technology and Education*, 2(1), 189–209.
<https://doi.org/10.62711/ijite.v2i1.101>

KPPN Barabai. (2025). *SPAN EXT*.
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/barabai/id/layanan/layanan-umum/spanext.html>

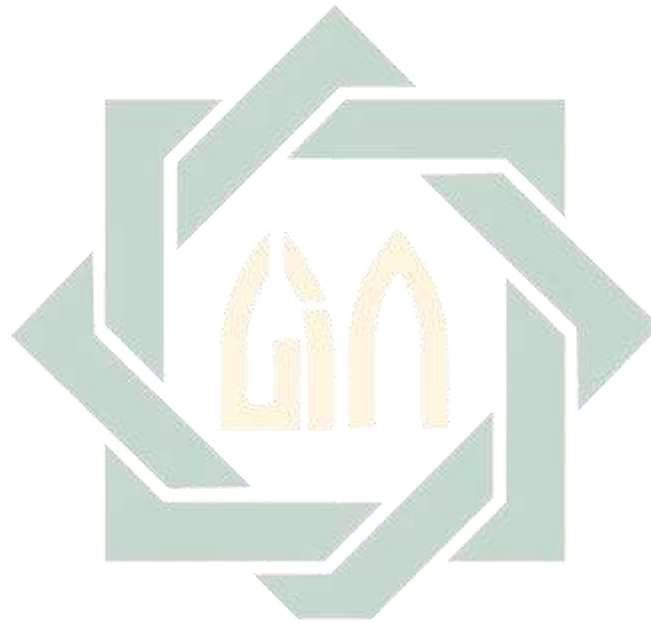
- KPPN Kotamobagu. (2017). *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotamobagu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2826-om-span.html>
- Kustyarini, & Utami, S. (2018). *Kiat Menulis Teks Prosedur*. Universitas Wisnuwardhana Malang Press (Unidha Press).
- Laniza Zaina, E. A. (with Istiqomah, & Wawan). (2020). *Hukum Anggaran dan Keuangan Negara* (Y. Y. Sukaca, Ed.). PT Cipta Gadhing Artha.
- Laraspati, A. (2021). *Bansoet Sebut 40% APBN/APBD Menguap oleh Korupsi*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5848377/bansoet-sebut-40-apbn-apbd-menguap-oleh-korupsi>
- Lathifah, N., Lutfia, C., Hidayatin, D. A., Sari, R. P., Fahriani, D., Rohmiatun, E. T., Nufaisa, & Herlina, S. (2022). *Serba Serbi Akuntansi Belajar Akuntansi mulai dari NOL Intisari Pembelajaran Akuntansi*. PT Arvi Jaya Abadi.
- Lestari, E. P. (2018). *Sistem Keuangan Pusat dan Daerah* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Mutmainnah, Ed.). Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Mauliva, F. M., & Manggalou, S. (2024). Implementasi Kebijakan Durasi Penyelesaian SP2D di KPPN Surabaya 1 Periode Triwulan Iv Tahun 2023. *Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.31293/pd.v23i1.7525>
- Mukin, A. B., Maria Prudensiana Leda Muga, & Minarni Anaci Dethan. (2024). Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(4), 205–222. <https://doi.org/10.61132/aepg.v1i4.610>
- Mustika, M., Amanda, N. N., Oktapia, S., & Ratman, M. N. (2025). Ketimpangan antara Sumber Daya dan Kinerja pada Organisasi Sektor Publik di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27432>
- Nina, W. I., Chairiyaton, C., & Sianturi, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan

- Prosedur Penanganan Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. *Jurnal Sains Riset*, 13(1), 150–159. <https://doi.org/10.47647/jsr.v13i1.1001>
- Nufaisa, Lating, A. I. S., & Muflihini, M. D. (2022). Refleksi Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Manifestasi Good Governance. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(2).
- Nugroho, D. (2025, July 4). *Menilai Kinerja Satuan Kerja dengan IKPA*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pacitan/id/data-publikasi/artikel/3134-literasi-tw-ii-menilai-kinerja-satuan-kerja-dengan-ikpa.html>
- Nuraidah, A. N. S. (2020). *Cara Mudah Memahami Teks Prosedur* (R. Pulungan, Ed.). Guepedia.
- Osuji Catherine, & Nkemjika Chika. (2021). Redefining Organizational Structure And Frameworks For Effective Implementation Of Open And Distance Learning (Odl) In Tertiary Institutions In Rivers State. *British Journal of Education, Learning and Development Psychology*.
- Priyo, & Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher.
- Redaksi Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. (2025). *Peta Wilayah Penyebaran KPPN*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/profil/sejarah/114-profil/2811-peta-wilayah-penyebaran-kppn.html>
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, N., & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(3), 31–42. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.15557>
- Sari, W. P. & Yusnaini. (2022). *Akuntansi Sektor Publik* (Fachrurozi, Ed.). University Medan Area Press.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). CV. Alfabeta.
- Suliantoro, I. (2020). Duplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Belanja Kementerian/Lembaga. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 16–30. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1025>
- Sumantri, M.M, J. (2017). Akselerasi Penyelesaian Dana Retur SP2D: Studi Kasus Pada Kantor Bayar KPPN Jakarta V. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.150>
- Transparency International Indonesia. (2025, February 20). *Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk – Sustainable Indonesia*. <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>
- Triwibowo, S. (2020). Public Financial Management And Corruption In Indonesia: A Panel Cointegration And Causality Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 34(3). <https://doi.org/10.22146/jieb.50719>
- Triyunanto, C. R. (2024, February 26). *APBN Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi hingga Struktur*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7210701/apbn-adalah-pengertian-dasar-hukum-fungsi-hingga-struktur>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Retrieved <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pub. L. 1. Retrieved October 21, 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, Pub. L. 17 (2003). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-17-tahun-2003>
- Utama, E. I. C., Ningsih, A. R. L., Raihan, A., & Maghfiroh, S. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan: (Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal). *Journal of Economics Development Issues*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.33005/jedi.v8i2.371>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.

Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Andri Kurniawan, Lastry Forsia, & Hery Nuraini, Eds.). Insania Grup Publikasi Yayasan Insan shodiqin Gunung Jati Anggota IKAPI.

Yahya, K. L., Amalia, I., & Nurhaini, L. (2023). Transformasi Digitalisasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Sukoharjo: Menuju Efisiensi Dan Transparansi. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 26–36. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i4.1095>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A